



Siaran pers

Dorong Penggunaan AI yang Etis dan Bertanggung Jawab, Surat Edaran Etika AI Peroleh Komitmen Sukarela dari Berbagai Perusahaan dan Pemangku Kepentingan

Jakarta, 19 Januari 2024 – ELSAM bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bisnis Indonesia, dan Atmajaya Institute of Public Policy menyelenggarakan Sarasehan AI Nasional pada Jumat, 19 Januari 2024, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Acara ini dihadiri para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, ahli, kelompok masyarakat sipil, dan praktisi industri teknologi. Beberapa stakeholder tersebut antara lain Microsoft, IBM, Telkomsel, Huawei, BRIN, AWS, Feedloop, Botika, BSSN, Alibaba, Goto, serta beberapa perwakilan negara asing seperti Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Singapura.

Sarasehan AI Nasional bertujuan untuk memperkuat komitmen pelaksanaan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan yang ditandatangani pada 19 Desember 2023 lalu. Surat edaran telah memberikan pedoman mengenai nilai-nilai etika yang harus dipenuhi oleh para pengembang serta pengguna AI. Nilai-nilai tersebut termasuk inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, dan kemanusiaan, dengan penekanan kuat pada kredibilitas dan akuntabilitas dalam penggunaan AI. Hal ini bertujuan untuk mengerangkan pendekatan yang berpusat pada manusia sebagai bagian penting dalam tata kelola AI.

“Tata kelola AI diperlukan untuk melindungi individu dari intrusi terhadap privasi yang dilakukan secara berlebihan oleh perusahaan, serta bias yang dihasilkan teknologi tersebut,” ujar Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Nezar berharap surat edaran ini akan menjadi panduan umum nilai etika dan tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial oleh pelaku usaha yang terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 62015 serta para penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan publik.

“Kita sebut ini sebagai *soft regulation* yang bisa menjadi panduan dan juga menjadi *base* untuk pengaturan yang lebih tinggi nantinya, karena kita juga sedang membicarakan dan menggagas untuk menyusun apa yang kita sebut sebagai Peraturan Menteri tentang tata kelola kecerdasan artifisial. Tentu saja akan lebih banyak bidang-bidang yang akan diatur di sana, jadi diskusinya akan kita buka juga lebih luas ke semua *stakeholder* untuk melihat apa-apa saja yang harus direspon yang cukup krusial.” kata Nezar.

Regulasi Sebagai Kunci Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Digital Berbasis AI

Menurut estimasi Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia berpotensi mendapatkan hingga USD2,8 triliun pada tahun 2040 melalui adopsi teknologi, sebuah peningkatan tahunan sebesar 0,55 persen terhadap pertumbuhan PDB dari tahun 2020 hingga 2040. AI diprediksi turut berperan dalam upaya memperoleh potensi maksimal dari estimasi tersebut. Laporan dari Kearney mengungkapkan bahwa teknologi ini bakal menyumbangkan USD366 miliar pada PDB Indonesia di tahun 2030. Angka

ini merupakan 12% dari total PDB yang diproyeksikan pada tahun tersebut, akan tetapi manfaat maksimal AI hanya dapat diraih dengan menghormati hak asasi manusia.

Surat Edaran ini mengenalkan tiga pendekatan utama. Pertama, mendorong penggunaan AI untuk mendukung aktivitas manusia yang akan mendorong kreativitas pengguna dalam pemecahan masalah dan pekerjaan. Kedua, menekankan privasi dan perlindungan data untuk mencegah kerugian pada pengguna. Terakhir, menganjurkan pengawasan yang ketat untuk mengendalikan potensi penyalahgunaan AI oleh badan pemerintah, swasta, dan pengguna.

Beberapa rekomendasi ELSAM turut melahirkan sejumlah prinsip yang sudah diakomodasi dalam surat edaran. Hal ini merupakan proses yang baik karena memberikan ruang partisipasi bermakna bagi para pemangku kepentingan pada sektor teknologi digital. “Kami berharap nantinya kebijakan yang dihasilkan oleh negara tidak menghambat perkembangan dari teknologi itu sendiri serta mampu juga secara baik memberikan perlindungan bagi warga negara dalam konteks hak asasi manusia,” kata Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif ELSAM.

Selain eksplorasi mendalam terhadap Surat Edaran Kominfo tersebut, rencana untuk mendirikan Kebijakan National AI Sandbox juga menjadi salah satu pembahasan yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi inovasi dan eksperimen AI di Indonesia. “Sandbox adalah kerangka kerja yang dibuat oleh pemerintah untuk memungkinkan pengujian dan eksperimen dengan *use cases* dan sistem AI dalam lingkungan yang terkendali. Di dalam sandbox ini pengembang dapat menguji sistem AI mereka, mengidentifikasi potensi risiko, dan menentukan strategi mitigasinya.” Kata Marie Claude dari Ernst Young. Sementara itu *regulatory sandbox* menurutnya akan membantu regulator agar dapat secara simultan mengamati uji coba ini, mengumpulkan data, dan merumuskan atau menyesuaikan peraturan untuk memandu penerapan AI yang aman dan etis di dunia nyata.

Perusahaan Berikan Komitmen Sukarela untuk Implementasi Etika AI

Guna mendorong praktik AI yang bertanggung jawab, sejumlah perusahaan serta pemangku kepentingan lain di Indonesia secara sukarela berkomitmen untuk menjunjung standar etika AI pada operasional bisnis maupun kegiatan mereka. Melalui komitmen sukarela ini, pedoman dalam pengembangan, implementasi, dan penggunaan AI di bidang masing-masing diharapkan mampu terlaksana secara efektif. Langkah tersebut menandai upaya bersama untuk mendorong praktik AI yang bertanggung jawab di Indonesia, membuka jalan bagi regulasi yang lebih formal di masa depan.

Salah satu perusahaan teknologi multinasional yang ikut memberikan dukungan dan komitmen sukarela tersebut, Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir mengatakan, “AI akan membantu menyelesaikan berbagai masalah yang mendesak, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, krisis iklim, dan lainnya. Penyelesaian ini hanya dapat terwujud apabila terdapat upaya bersama, baik dari sektor publik maupun sektor privat untuk mengembangkan dan menggunakan AI secara bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan etika yang kita sepakati bersama”.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: Wahyudi Djafar wahyud@elsam.or.id atau Parasurama Pamungkas parasurama@elsam.or.id